

**KEDUDUKAN AHLI WARIS BEDA AGAMA MENURUT KOMPILASI  
HUKUM ISLAM  
(Analisis Yuridis Terhadap Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.  
Nomor : 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**Oleh:  
RESYA KRISNA AYU TJINI  
(135010107111161)**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2018**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : KEDUDUKAN AHLI WARIS BEDA AGAMA MENURUT  
KOMPILASI HUKUM ISLAM

(Analisis Yuridis Terhadap Putusan Yurisprudensi Mahkamah  
Agung RI. Nomor : 51 K/AG/1999 tanggal 12 September 1999)

Identitas Penulis :

a. Nama : Resya Krisna Ayu Tjini

b. NIM : 135010107111161

Konsentrasi : Hukum Keperdataan

Jangka waktu penelitian : 4 bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Thohir Luth, MA  
NIP. 19540807198601101

Fitri Hidayat, S.H., M.H.  
NIK. 2012088507072001

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Perdata

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.  
NIP. 197206222005011002

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Brawijaya. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, motivasi, dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama ini, antara lain kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis, atas segala doa dan dukungannya kepada penulis;
2. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Thohir Luth, MA . selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Ibu Fitri Hidayat, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H.,LLM, selaku Ketua Bagian Konsentrasi Keperdataan.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, 1 Januari 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
RINGKASAN.....	vi
SUMMARY .....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latarbelakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II.KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Waris Islam .....	11
1. Waris Islam menurut ayat – ayat Al – Quran .....	11
2. Waris Islam menurut Hadist – Hadist.....	13
3. Hukum Waris Islam di Indonesia .....	14
B. Tinjauan Umum Syarat Pembagian Waris .....	16
1. Meninggal dunianya pewaris .....	16
2. Hidupnya ahli waris.....	17
3. Mengetahui status kewarisan dari ahli waris .....	17
C. Tinjauan Umum Halangan Mewaris.....	18
1. Mahrum (yang diharamkan) / Mamnu' (yang dilarang).....	18
2. Hijab .....	19
BAB III.METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian .....	21
B. Pendekatan Penelitian.....	21
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	23
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum .....	24
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	25
BAB IV.HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Putusan Hakim yang memberikan waris pada ahli Waris Beda Agama .....	26
1. Posisi Kasus .....	26
B. Analisa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51 K/AG/. .....	39
1. Wasiat Wajibah.....	39
2. Ahli Waris Pengganti.....	41
C. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999 .....	50

BAB V.KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59

## RINGKASAN

RESYA KRISNA AYU TJINI, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2017, KEDUDUKAN AHLI WARIS BEDA AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999), Prof. Dr. Thohir Luth, MA, Fitri Hidayat, S.H., M.H

Pada skripsi ini peneliti mengangkat tentang kedudukan ahli waris beda agama menurut kompilasi hukum islam (Analisis Yuridis Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 51K/AG/1999 tanggal 29 September 1999). Pilihan judul tersebut dilatar belakangi oleh dalam putusan nomor 51 K/AG/1999 dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris muslim dan mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris muslim berdasarkan wasiat wajibah, dalam putusan ini dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dianggap sebagai ahli waris. Dasar pertimbangan Hakim disini yang mengabulkan bahwa ahli waris beda agama juga mendapatkan kedudukan yang sama dengan ahli waris yang tidak beda agama adalah rasa keadilan. Amar putusan tersebut diatas menimbulkan kontroversi karena tidak ada satu dalil yang mengatur tentang pemberian *wasiat wajibah* bagi ahli waris yang berbeda agama dengan si pewaris. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) saja tidak ada mengatur tentang *wasiat wajibah* bagi orang yang berbeda agama. *Wasiat wajibah* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur tentang anak angkat dan orang tua angkat.

Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah Apakah pertimbangan hakim mengenai asas keadilan dapat dijadikan alasan dasar untuk menyimpangi atauran kewarisan dalam Hukum Islam?

Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh peneliti dianalisis dengan studi kepustakaan yang kemudian ditarik kesimpulan, setelah bahan hukum tersebut di klasifikasikan kemudian dilakukan teknik Penemuan Hukum dan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi gramatikal

Hasil penelitian dengan metode diatas, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan. Kehadiran putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51 KJAG/1999 untuk menciptakan “standar hukum”. Yurisprudensi yang benar-benar mengandung unsur rasional, praktis dan aktual dapat dijadikan sebagai standar hukum mengenai kasus tertentu dalam kehidupan peradilan suatu bangsa. Jika dalam suatu peraturan perundang-undangan yang telah dijadikan hukum positif tidak mengatur secara konkrit suatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, hakim harus berperan menciptakan hukum baru yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Ada pun porsi harta warisan yang dikeluarkan lewat wasiat wajibah ini untuk saudara kandung berbeda agama adalah sama dengan bagian warisan saudara kandung muslim yang sederajat Jadi alasan dasar hakim mengenai asas keadilan dapat menyimpangi aturan kewarisan dalam Hukum Islam.

## SUMMARY

RESYA KRISNA AYU TJINI, Civil Law, Faculty of Law University of Brawijaya, June 2017, POSITION OF HEIRS OF DIFFERENT RELIGIONS BASED ON COMPILATION OF ISLAMIC LAW (Juridical Analysis toward Jurisprudence Decision of Supreme Court RI. Number: 51 K/AG/1999 on 29 September 1999), Prof. Dr. Thohir Luth, MA, Fitri Hidayat, S.H., M.H.

In this undergraduate thesis, the researcher raised the issue about the position of heirs of different religions based on compilation of Islamic law (Juridical Analysis of Jurisprudence Decision of Supreme Court RI. Number: 51K/AG/1999 on 29 September 1999). The choice of the title was based on the decision number 51 K/AG/1999, which stated that the non-Muslim heirs are declared as heirs of the Muslim heirs and get the same part as the Muslim heirs based on mandatory will. This decision stated that the non-Muslim heirs are considered as the heirs. Judge's basic consideration showed that the heirs of different religions also get the same position as the heirs of the same religions is a sense of justice. The aforementioned verdict raised controversy because there is no postulate regulating the provision of a mandatory will for the heirs who have different religion with the heir. In the Compilation of Islamic Law (KHI) alone, there is no regulation about the mandatory will for people of different religions. The mandatory will contained in the Compilation of Islamic Law only regulate the adopted child and the adoptive parents.

Based on this, this undergraduate thesis raised the research problem, is the judge's consideration of the principle of justice can be used as a basic reason to deviate the inheritance in Islamic Law? This thesis used normative juridical with a method of legislation approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by researchers were analyzed by literature study, then the conclusion was drawn. After the legal materials were classified, a technique of Law Discovery and interpretation using method of grammatical were done.

From the result of the research with the above method, researcher obtained the answer to the problem. The presence of the Supreme Court's decision No. 51 KJAG/1999 was to create a "legal standard". Jurisprudence that really contains rational, practical, and actual elements can be used as a legal standard on a particular case in the life of a nation's judiciary. If a legislation that has been made a positive law does not regulate concretely a problem faced by society, the judge must determine a new law in accordance with the development and needs of society. Such decisions shall be followed together as a reference in settling the same case dispute without prejudice to the judgments and considerations of a "variable" nature in accordance with the "particular reason" contained therein. There is also a portion of the inheritance issued by this mandatory will for the siblings of different religions is the same as the inheritance parts of the equivalent Muslim siblings Therefore, the basic reason the judge on the principle of justice can deviate rules of inheritance in Islamic Law.